

PEMIMPIN BERVISI SPASIAL UNTUK MEMBANGUN (KEMBALI) KEJAYAAN INDONESIA

Bambang Syaeful Hadi

Jurusan Pendidikan Geografi FIS UNY

Email: bab_saifulhadi@lycos.com

Abstrak

Kejayaan yang pernah diraih oleh nenek moyang Bangsa Indonesia yakni oleh Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan spirit dan kaca benggala yang dapat dijadikan tolok ukur terhadap apa yang telah dikerjakan beberapa rezim yang menguasai Indonesia, sejak orde lama hingga orde reformasi. Titik tumpu pembangunan sejak jaman orde lama hingga kini, yang tidak menempatkan kelautan, pengelolaan sumber-sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, lepasnya beberapa wilayah dari pangkuan ibu pertiwi merupakan cermin dari buruknya kemampuan berpikir spasial para pemimpin negeri ini. Tulisan singkat ini mencoba untuk menguraikan urgensi kemampuan berpikir spasial pemimpin untuk membangun (kembali) kejayaan yang pernah diraih oleh nenek moyang bangsa ini.

Kemampuan berpikir spasial dicirikan oleh kemampuan untuk memahami gejala di wilayahnya dengan kemampuan *comparison, aura, region, transition, analogy, hierarchy, pattern, association*. Visi pemimpin yang didasari oleh kemampuan berpikir spasial akan memberikan warna pada kepemimpinannya pada pengelolaan wilayah selaras karakteristik fisiografis dan non fisiografis, sehingga tersusun model pembangunan yang berbasis pada kondisi aktual lingkungan, kondisi fisiografis wilayah (negara tropis, negara maritim, negara kepulauan, negara multi risiko bencana alam dan sosial, dan posisi geopolitik negara).

Kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang merupakan nenek moyang memiliki luas wilayah lebih dari Indonesia saat ini. Keduanya memiliki penguasaan laut yang baik, terbukti dengan kekuatan armadanya untuk menaklukkan berbagai wilayah. Indonesia saat ini orientasi pembangunannya lebih ke darat. Fakta ini menunjukkan kekurangpahaman para pemimpin terhadap kondisi geografis wilayahnya. Daratan Indonesia yang hanya sepertiga dari lautannya justru menjadi arena perebutan kue kehidupan, sementara lautannya yang menyimpan berjuta potensi dibiarkan untuk dieksploitasi negara lain.

Pengantar

Selama masa hampir tujuh dasawarsa pembangunan negeri ini ada salah satu kelemahan yang sangat mendasar yakni kurangnya kemampuan para penyelenggara negara dalam berpikir secara spasial. Sejarah telah membuktikan bahwa para pendahulu penyelenggara negara yang dulu bernama Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit telah berpikir dan bertindak secara spasial. Saat itu para penyelenggara negara memahami karakteristik wilayah yang berbentuk kepulauan (*Archipagic State*) terbukti mereka dalam membangun dan menguasai wilayah lebih berorientasi pada maritim.

Sebagai bukti luasnya kekuasaan kedua kerajaan Bangsa Indonesia ini kedua kerajaan tersebut menurut catatan sejarah lebih luas dari luas Indonesia saat ini. Menurut *Kakawin Negara Kertagama* pupuh XIII-XV sebagaimana dikutip Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (1990), daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatra, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara Maluku, Papua, Tumasik (Singapura) dan sebagian Kepulauan Filipina. Kedua kerajaan tersebut sangat memperhatikan pembangunan kelautan, terbukti dengan angkatan lautnya yang sangat kuat, pengelolaan dan penguasaan wilayah yang luas dan lancarnya perdagangan antar pulau, didatangi oleh para pedagang dari India, China, dan negara-negara di sekitarnya.

Penjajahan Belanda selama berabad-abad dengan politik *Devide et Impera* selalu berusaha memecah belah bagian wilayah Indonesia supaya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di samping itu Belanda berusaha mengalihkan perhatian penduduk Indonesia ke arah darat, karena Belanda menyadari bila kepulauan nusantara bersatu akan menjadi kekuatan yang besar sebagaimana terjadi pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Dampaknya hingga kini pembangunan Indonesia dari zaman Soekarno sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu berorientasi ke darat, kecuali pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang mencoba mengarahkan dan menyadarkan arti penting potensi laut bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sayangnya masa pemerintahannya tidak berjalan lama. Masa pembangunan Indonesia yang dianggap berhasil adalah di masa rezim orde baru yakni selama 32 tahun, yang tahap pembangunannya di sebut PELITA. Bila dilihat dari orientasi progam pembangunan dalam setiap PELITA dalam kurun lima periode selalu menitikberatkan pada progam pertanian dan industri. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan Indonesia selalu berorientasi ke darat, padahal luas daratan Indonesia hanya sepertiga dari seluruh wilayah, yakni sekitar 1.922.570 km², sementara luas lautannya adalah sekitar 3.257.483 km².

Fenomena orientasi pembangunan yang selalu berorientasi ke darat, privatisasi BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak, lepasnya beberapa wilayah dari pangkuan pertiwi, pengelolaan sumber-sumber daya alam kepada perusahaan asing, rendahnya pengawasan laut sehingga banyak terjadi pencurian kekayaan laut oleh nelayan asing menunjukkan lemahnya pemahaman para pe-

mimpin negeri ini terhadap kondisi geografis dan rendahnya pemahaman spasial. Untuk dapat memahami kondisi spasial wilayah, dibutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan berpikir spasial yang memadai.

Pemimpin Cakap Berpikir Spasial

Selama ini pola rekrutmen pemimpin negeri ini lebih ditentukan oleh proses-proses politisi, sehingga persyaratan seorang pemimpin juga ditentukan oleh para politikus. Persyaratan pemimpin tidak digali berdasarkan kondisi riil dan aktual saat ini. Persyaratan akademis seorang calon presiden saja selalu berujung diperdebatkan, bukan untuk perbaikan, tetapi lebih karena kepentingan politik. Alih-alih menyusun persyaratan kepemimpinan berdasarkan cetak biru pembangunan untuk masa depan berdasarkan karakteristik kondisi fisiografis dan fisiografis Indonesia, para legislator malah lebih mementingkan kepentingan kelompoknya.

Suatu kesalahan besar yang dilakukan oleh para pemimpin negeri ini adalah memimpin negeri ini tidak memperhatikan aspek spasial negara ini, sehingga masalah lingkungan semakin menggurita, pemahaman dalam pengelolaan sumber-sumber daya alam pada level yang mengkhawatirkan, dan perhatian pada wilayah laut yang minim, sehingga layaklah bila negeri ini hingga kini tidak dapat menikmati kehidupan yang sejahtera. Untuk dapat mengelola wilayah yang sedemikian luas, para pemimpin negeri ini tidak boleh tidak harus memiliki kemampuan berpikir spasial.

Menurut *Association of American Geographers* (2007), ada 8 komponen kemampuan berpikir spasial fundamental, yakni:

- a. *Comparison* (kondisi dan koneksi spasial), kemampuan membandingkan bagaimana tempat-tempat mempunyai persamaan dan perbedaan. Urgensi pemimpin memiliki kemampuan ini adalah untuk membuat menyusun perlakuan terhadap suatu wilayah, perencanaan pembangunan, alokasi, penyusunan skala prioritas pengembangan wilayah, dan pengembangan wilayah (aksesibilitas fisik dan non fisik).
- b. *Aura*, (*spatial aura* merupakan zona pengaruh suatu objek ke sekitarnya) kemampuan menunjukkan efek dari kekhasan suatu daerah terhadap daerah yang berdekatan.
- c. *Region*, kemampuan mengidentifikasi tempat-tempat yang memiliki kesamaan dan mengklasifikasikannya sebagai satu kesatuan.
- d. *Hierarchy*, kemampuan untuk menunjukkan tempat-tempat yang sesuai dengan hirarki dalam sekumpulan area
- e. *Transition*, kemampuan menganalisis perubahan tempat-tempat apakah terjadi secara mendadak, gradual, atau tidak teratur
- f. *Analogy*, kemampuan menganalisis apakah tempat-tempat yang berjauhan tetapi memiliki lokasi yang sama dan karena itu mungkin memiliki kondisi dan atau koneksi yang sama

- g. *Pattern*, kemampuan untuk mengklasifikasi suatu fenomena apakah dalam kondisi berkelompok, linier, menyerupai cincin, acak, atau lainnya
- h. *Assosiation* (korelasi), kemampuan membaca terhadap suatu gejala yang berpasangan yang memiliki kecenderungan terjadi secara bersama-sama di lokasi yang sama (yang mempunyai pola spasial yang sama)

Para pemerhati dalam bidang ini, terutama dari kalangan geosains, psikologi, dan neurologi berusaha menyusun sejumlah konsep *spatial thinking* ini agar mudah diterima berbagai kalangan. Bandingkan komponen berpikir spasial yang dikemukakan AAG (dikutip oleh Gersmehl and Gersmehl) di atas dengan komponen yang dikemukakan ahli lainnya. Tampak bahwa ketiganya memiliki konsep yang hampir sama. Ketiga konsep pada tabel tersebut menjadi sangat relevan dengan konsep berpikir spasial yang dikemukakan oleh Carleton (2007), yakni berpikir spasial adalah berpikir untuk menemukan makna pada, ukuran, bentuk, orientasi, arah lokasi, atau lintasan benda, proses atau fenomena, atau posisi relatif dalam ruang beberapa objek, proses atau fenomena. Berpikir spasial menggunakan segala yang ada pada ruang sebagai sarana untuk penataan masalah, untuk menemukan jawaban, dan untuk mengekspresikan solusi.

Tabel 1. Konsep Berpikir Spasial yang diusulkan oleh Gersmehl dan Gersmehl, Golledge dkk, dan Janelle and Goodchild

Gersmehl dan Gersmehl	Golledge dkk	Janelle and Goodchild
Kondisi Lokasi koneksi perbandingan Aura Region hirarkhi transisi analogi pola Asosiasi spatial	Identitas Tempat Konektivitas Jarak Skala Mencocokkan pola Buffer Kedekatan, Klasifikasi Gradien, Profil koordinat Pola, susunan, distribusi, Order, Urutan Asosiasi Spasial, tumpang susun / dissolve interpolasi Proyeksi, Transformasi	Obyek dan bidang Lokasi jaringan jarak skala Lingkungan dan Daerah Dependensi spasial, Heterogenitas spasial

Sumber: Berdnaz and Lee, 2011

Kasus lepasnya Kepulauan Simpadan dan Ligitan, pergeseran batas negara yang cenderung menyempit, lapasnya Timur-Timor, sengketa-sengketa batas wilayah, pencurian potensi laut oleh negara lain menunjukkan bahwa penguasaan penyelenggaraan negara terhadap laut sangat rendah. Pemanfaatan potensi laut yang demikian melimpah masih belum optimal sehingga belum dapat memberi-

kan kontribusi bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Paparan di atas menunjukkan bahwa para penyelenggara Negara Indonesia dari rezim ke rezim tidak memiliki kecerdasan spasial. Di masa mendatang harus ada perubahan paradigma pembangunan dari darat ke maritim. Selama ini tidak ada upaya khusus untuk mengembangkan kecerdasan spasial.

Upaya yang paling strategis untuk merubah paradigma tersebut adalah melalui pendidikan sehingga siswa yang saat ini sedang dalam masa belajar kelak pada saat menerima estafet pembangunan, mereka memiliki paradigma berfikir dan cerdas secara keruangan. Diantara sekian mata pelajaran yang paling memungkinkan untuk penanaman wawasan keruangan dan pengembangan kecerdasan adalah pelajaran Geografi. Pembelajaran Geografi memungkinkan pengenalan pada karakteristik dan potensi wilayah, serta strategi pembangunan yang berorientasi ke maritim dan cerdas secara spasial. Kecerdasan spasial merupakan jenis kecerdasan yang sangat penting bagi setiap orang terutama ahli perencanaan ruang/wilayah, perancang strategi perang, kartografer, para pemimpin, para pengembang geografi regional, surveyor, dan lain-lain.

Cerdas spasial merupakan konsep kecerdasan yang dikembangkan oleh Gardner. Cerdas spasial adalah salah satu jenis kecerdasan dalam teori kecerdasan ganda. Untuk penanaman dan pengembangan kecerdasan spasial dapat dilakukan sejak usia dini sampai tiap jenjang pendidikan tinggi. Untuk itu perlu dirumuskan model dan strategi pembelajaran yang memungkinkan berkembangnya kecerdasan spasial pada setiap jenjang pendidikan. hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa jenis-jenis kecerdasan berkembang pada tahap usia yang berbeda-beda, misalnya kecerdasan musikal lebih awal berkembang pada usia dini.

Upaya Meraih (kembali) Kejayaan

Upaya meraih kembali kejayaan yang pernah diraih oleh Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya yang berkuasa pada abad 7 sampai awal abad ke-13), dan mencapai keemasan pada masa Raja Balaputra Dewa (berdasarkan prasasti Nalanda, 860). Salah satu faktor yang menyebabkan Kerajaan Sriwijaya bisa menguasai seluruh bagian barat nusantara adalah runtuhnya kerajaan Fu-Nan di Indocina. sebelumnya, Fu-Nan adalah satu-satunya pemegang kendali di wilayah perairan selat malaka. faktor lainnya adalah kekuatan armada laut kerajaan Sriwijaya yang mampu menguasai jalur lalu lintas perdagangan antara india dan cina. dengan kekuatan armada yang besar, kerajaan Sriwijaya kemudian melakukan ekspansi wilayah sampai ke Pulau Jawa (Jawa Dwipa) (<http://www.nttuweb.com/ntt/sejarah/>).

Kerajaan Majapahit (1293-1518) didirikan oleh Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana (berkuasa tahun 1293-1309), mencapai masa keemasan pada saat kerajaan dipimpin oleh Hayam Wuruk (bergelar Sri Rajasanagara) yang berkuasa pada periode tahun 1350-1389) berkat dukungan dan kegigihan

mahapatih Gajah Mada dalam menaklukan berbagai wilayah di saentaro nusantara. Majapahit saat itu telah mengenal manajemen wilayah modern, wilayah-wilayah dibagi dalam beberapa teritorial, yakni (1) *Negara Agung*, atau Negara Utama, inti kerajaan. Area awal Majapahit atau Majapahit Lama selama masa pembentukannya sebelum memasuki era kemaharajaan, mencakup wilayah dimana raja dapat secara aktif mengaturnya; (2) *Mancanagara*, area yang melingkupi *Negara Agung*. Area ini secara langsung dipengaruhi oleh kebudayaan Jawa, dan wajib membayar upeti tahunan. Akan tetapi, area-area tersebut biasanya memiliki penguasa atau raja pribumi, yang kemungkinan membentuk persekutuan atau menikah dengan keluarga kerajaan Majapahit; (3) *Nusantara*, adalah area yang tidak mencerminkan kebudayaan Jawa, tetapi termasuk ke dalam koloni dan mereka harus membayar upeti tahunan (Rosita Dellios, 2003).

Bila dianalisis lebih jauh, wilayah kerajaan Majapahit yang sedemikian luas di wilayah yang berbentuk kepulauan, dan sarana transportasi yang ada untuk bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain berupa kendaraan air, maka dipastikan bahwa kekuatan utama kerajaan Majapahit adalah pada angkatan lautnya. Kalau dibandingkan dengan sejarah kekuasaan kerajaan Inggris yang berhasil melakukan penaklukan berbagai wilayah juga pada kekuatan angkatan lautnya. Kondisi wilayah nusantara yang merupakan negeri kepulauan (*archipelagic state*) seharusnya membuat pemimpin negeri ini untuk belajar pada kesuksesan para pemimpin nenek moyang.

Pada saat alat transportasi berkembang pesat, yang dapat digunakan untuk mendukung kontrol wilayah, tampaknya membuat para pemimpin lupa untuk memperhatikan laut. Paradigma negara maritim telah ditinggalkan, alasannya mata pencaharian sebagian besar rakyat pada masa orde lama dan orde baru adalah pertanian, sehingga titik tumpu pembangunan adalah di bidang pertanian. Mereka lupa kalau wilayah Indonesia sebagian besar berupa laut. Paradigma pembangunan yang berorientasi daratan (baca pertanian) saja, menganggap laut sebagai pemisah antar pulau. Untuk mengatasi persepsi dan paradigma yang berorientasi darat ini, The Habibie Center, Departemen Kelautan dan Perikanan, dan Dewan Maritim Indonesia, memperkenalkan paradigma baru yakni paradigma wilayah benua maritim. Inti paradigma ini memandang wilayah Negara kepulauan sebagai satu benua, karena dilihat dari sejarah geologinya berjuta tahun sebelum es mencair menjadi laut, pulau-pulau tersebut merupakan satu benua yang tidak terpisah-pisah (Gondwana). Karena pulau-pulau saat ini telah terpisah oleh perairan, maka penyatunya adalah dasar laut, sehingga menjadi benua dasar laut yang harus dikelola secara terpadu. Tetapi karena luasnya benua laut ini, maka wilayah benua maritim Indonesia dibagi menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil yang dinamakan wilayah kemaritiman.

Dalam wilayah kemaritiman terdapat berbagai wilayah seperti DAS, wilayah homogen, wilayah nodal, mungkin beberapa wilayah metropolitan, yang berinteraksi melalui laut. Dengan paradigma ini, maka laut bukan sebagai pemi-

sah, tetapi laut sebagai penyatu. Laut mengintegrasikan antar wilayah darat (Son Diamar dalam Jakob Rais, 2004).

Praktik otonomi daerah saat ini, yang mendsarkan pengelolaan wilayah berbasis satuan wilayah kabupaten juga mencerminkan lemahnya pemahaman para pemimpin terhadap aspek spasial. Satuan pengelolaan kabupaten menyebabkan terjadinya berbagai kerusakan lingkungan, berbagai bencana dan keke-
ringan, persaingan tidak sehat antar wilayah, konflik regional, dan lain-lain. Otonomi dengan basis wilayah kabupaten lebih berorientasi pada memudahkan pengaturan dan wilayah administrasi tanpa memperhatikan kondisi fisiografis antar wilayah, dan perhatian terhadap dampak dari kondisi wilayah yang tidak dikelola atas dasar satuan DAS. Kabupaten-kabupaten yang berada pada satu DAS tetapi tidak dikelola atas dasar karakteristik DAS akan membawa keru-
sakan yang lebih parah, karena pembangunan yang dilaksanakan tidak selaras alam (biofisikal).

Pada saat ini mau tidak mau, kalau negara ini menginginkan untuk meraih kembali kejayaan Sriwijaya dan Majapahit, maka orientasi pembangunan negara agraris-maritim ini harus lebih banyak ke laut. Persoalan tabal batas negara, yang sebagian besar tapal batas ini terletak di laut harus diselesaikan secepatnya. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam hal batas ini adalah pemberian tanda dan pengawasan yang cukup dari suatu negara, dimana pengawasan ini dapat pula didukung oleh rakyat. Tanpa pengawasan dan batas yang memadai maka batas ini akan menjadi tidak bermakna. Apalagi region Indonesia yang banyak berbatasan dengan negara lain ditambah pula dengan garis pantai yang panjang, sehingga kemungkinan terjadi penyusupan/ infiltrasi darsangat besar.

Untuk mengatasi persoalan tersebut perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut tentang batas laut Indonesia secara konkrit dan peningkatan pengamanan laut Indonesia yang saat ini masih sangat rendah. Pasalnya, tidak jelas siapa sebenarnya yang bertugas melakukan pengamanan laut. Yang terjadi malah tumpang tindih tugas antar instansi, sehingga perompakan, *illegal fishing*, penyusupan tentara dan nelayan negara tetangga tidak ada yang secara intensif mengurusnya.

Kondisi rendahnya pengamanan laut Indonesia lebih disebabkan persoalan internal dalam penanganan pengamanan laut. Saat ini, pengamanan laut diko-
ordinasikan dalam suatu badan koordinasi pengamanan laut (Bakortanal) yang terdiri dari TNI AL, Bea cukai, polisi perairan (Pol-Air), dan beberapa instasi yang terkait. Namun karena Bakortanal bentuknya koordinasi, inilah yang men-
jadi masalah karena masing-masing instansi sering berjalan sendiri-sendiri. Khususnya, yang menyangkut masalah logistik dan operasional, sehingga malah tidak ada koordinasi dalam pengamanan laut. Oleh karena itu lebih baik Bakor-
tanal tidak hanya sebatas koordinasi, tetapi juga diberikan tambahan kekuatan menjadi satuan komando, sehingga tugasnya lebih terintegrasi dalam operasio-
nal. Siapa saja bisa memimpin dan tidak harus TNI AL agar lebih terjamin kepastian hukum dalam pengamanan laut.

Untuk menghindari berbagai permasalahan di laut, dari sekedar pencurian sumberdaya kelautan sampai pada klaim wilayah laut oleh negara lain, sebaiknya para pemimpin negeri ini mengutamakan kekuatan pengamanan laut. Saat ini, dengan wilayah laut yang sangat luas, yang mengelilingi kira-kira 13.000 pulau (menurut survei terakhir yang dilakukan oleh Kementerian KKP, data sebelumnya menyebutkan jumlahnya 17.480 pulau), Indonesia harus memperkuat sumberdaya manusia dan institusi yang menangani laut. Kepemilikan armada aktif (pemukul, patroli, pendukung, lainnya) jumlahnya belum proporsional dengan luas wilayah yang harus diamankan. Indonesia hanya memiliki 148 kapal perang, 2 kapal selam, 317 kapal patroli. Untuk meraih kejayaan, para pemimpin harus memperhatikan laut.

Penutup

Kejayaan kerajaan nenek moyang Bangsa Indonesia dilandasi oleh pemahaman para pemimpinnya yang tahu betul kondisi teritorial nusantara yang sebagian besar berupa lautan. Mereka mempunyai kemampuan berpikir spasial, atas dasar kemampuan tersebut, maka penguasaan laut merupakan syarat mutlak untuk menguasai wilayah lainnya. Penaklukan demi penaklukan wilayah, dilakukan melalui kekuatan angkatan laut.

Para pemimpin negeri nusantara ini harus belajar dari sejarah, bagaimana perhatian para pemimpin masa lalu yang menguasai laut, tetapi bukan berarti meninggalkan daratan. Negeri agraris-maritim ini harus dikelola oleh para pemimpin yang memahami kondisi spasial wilayah Indonesia, yang memiliki daratan yang subur dan lautan yang memiliki sumberdaya yang melimpah. Akankah negeri yang kaya sumberdaya alam ini, tetap merana, tetap terkungkung kemiskinan karena pemimpinnya tidak bervisi spasial? *Wallohu a'lam bishshowab.*

DAFTAR PUSTAKA

- Berdnarz, Robert S and Lee, Jongwon, (2011). The Component of Spatial Thinking: empirical evidence. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, International Conference: Spatial Thinking and Geographic Information Sciences.
- Dellios, Rosita (2003). "Mandala: from sacred origins to sovereign affairs in traditional Southeast Asia". Bond University Australia. Diakses pada 10-4-2013.
- Gersmehl, Philip J. and Gersmehl, Carol A.(2007) 'Spatial Thinking by Young Children: Neurologic Evidence for Early Development and "Educability"', *Journal of Geography*, 106: 5, 181 – 191.
- Poesponegoro, M.D., Notosusanto, N. (editor utama), (1990). *Sejarah Nasional Indonesia*. Edisi ke-4. Jilid II. Jakarta: Balai Pustaka.

Yakub Rais (ed), (2004). *Menata Ruang Laut Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
Yakub Rais, 2006. Pulau-pulau Kecil itu Kapan Punya nama?. *Samudra - Edisi 35*
- Thn IV - Februari- 2006. Hal 22-23.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Majapahit>

<http://www.nttuweb.com/ntt/sejarah/>

MENANAMKAN JIWA KEPEMIMPINAN DALAM PEMBELAJARAN EKONOMI

Enung Hasanah
SMA Negeri I Depok

Abstrak

Indonesia saat ini sedang dilanda krisis moral dan kepemimpinan. Hal ini perlu diantisipasi dengan menanamkan jiwa kepemimpinan generasi muda, sebab setiap anak merupakan bibit bagi masa depan bangsa kita. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji: 1) Bagaimanakah cara menanamkan jiwa kepemimpinan pembelajaran ekonomi, 2) Jiwa kepemimpinan apa yang dapat ditanamkan melalui pembelajaran ekonomi?

Hasil kajian menunjukkan bahwa 1) Cara menanamkan jiwa kepemimpinan peserta didik dalam pembelajaran ekonomi yaitu dengan memberikan berbagai kesempatan dan pilihan bagi peserta didik supaya memahami inti pembelajaran dan melatih mereka untuk dapat menyelesaikan masalah ekonomi di masyarakat, 2) Jiwa kepemimpinan yang dapat ditanamkan dalam pembelajaran ekonomi adalah kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan dan melatih kepercayaan diri.

Kata kunci: *pembelajaran, ekonomi, jiwa kepemimpinan*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang subur secara alamiah. Namun, kenyataannya kemiskinan masih saja tinggi, hingga maret 2010 saja jumlah penduduk miskin masih sebesar 31.020.000 jiwa (13,33%). Tahun 2009, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada pada peringkat ke-111 dari 182 negara. Selain itu, tindakan para koruptor tidak kalah meresahkan bangsa ini. Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia sedang dilanda krisis moral dan kepemimpinan. Alam demokrasi di Indonesia yang memberi kebebasan kepada setiap rakyatnya, kini malah dijadikan ajang pembenaran pendapat pribadi oleh para (oknum) pemimpin (penguasa) maupun rakyat biasa demi kepuasan pribadinya.

Indonesia kini memerlukan pemimpin hebat sekelas Jenderal Sudirman yang rela mengorbankan kepentingan pribadinya demi bangsa ini. Untuk itu diperlukan upaya-upaya konkrit yang dapat menghasilkan generasi penerus

yang berkualitas yang mampu meneruskan tonggak kepemimpinan bangsa secara lebih baik.

Pendidikan merupakan media yang paling efektif untuk membangun jiwa kepemimpinan generasi muda. Melalui pendidikan, para pemuda akan mendapatkan berbagai pengalaman hidup yang dapat mematangkan kepribadian dan cara berfikirnya. Secara ideal, proses pendidikan harus mampu memberi penguatan-penguatan positif terhadap perkembangan potensi peserta didik baik dari aspek afektif, kognitif, dan psikomotor secara inkoheren. Ketiga aspek tersebut seyogyanya dikemas dalam kegiatan pembelajaran aktif yang bersinergi dengan penanaman budaya karakter bangsa.

Mata Pelajaran Ekonomi merupakan bagian dari ilmu sosial yang dipelajari peserta didik tingkat SMA yang fokus pembahasannya mengenai bagaimana memenuhi kebutuhan yang terus meningkat sementara alat pemuas kebutuhannya terbatas. Sementara itu, belajar ilmu sosial merupakan pendidikan afektif melalui latihan profesional, pengalaman hidup, dan nilai-nilai sosial serta nilai kepribadian yang akan menuntun kita dalam mengambil keputusan (Brown, Keen & Dyball, 2005: 256). Dengan demikian mata pelajaran ekonomi memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat menanamkan jiwa kepemimpinan, baik dari segi materi maupun proses pembelajaran.

Kepemimpinan

Pemimpin bukanlah orang yang tahu segalanya (Stevenson, 2006:184). Para pemimpin bisa saja tidak memiliki keterampilan praktik dalam politik atau pun bisnis, tetapi mereka mampu memberikan pandangan jauh ke depan dan mampu membuat orang yang dipimpinnya semakin menjadi berhasil dengan mengikuti arahan dari sang pemimpin.

Seorang pemimpin mampu mengambil keputusan tanpa keraguan. Dengan demikian kepemimpinan/leadership memegang peranan yang sangat penting dalam manajemen, bahkan dapat dinyatakan, kepemimpinan adalah inti dari manajemen.

McCauly, Moxley, & Velsor (1998: 14) menyatakan bahwa peran dan proses kepemimpinan membutuhkan pembaharuan, harus mampu mengatasi kesulitan, konflik, dan kekecewaan. Kepemimpinan itu sendiri adalah tantangan yang terus dikembangkan. Kemampuan memimpin adalah kemampuan yang berasal dari, dan untuk dirinya sendiri melalui pengalaman yang sudah dilalui dalam hidupnya maupun dari orang lain. Berdasarkan hal itu, jelaslah bahwa kepemimpinan adalah sifat yang sangat kompleks.

Di dunia ini, ada orang-orang yang telah menjadi pemimpin besar tetapi memiliki ambisi pribadi terlalu banyak atau keserakahan, sehingga kepemimpinannya hancur bahkan bisa berakhir di penjara. Maka kemampuan memimpin, bukanlah sekedar mampu mengatur orang lain dan lingkungannya, melainkan